

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pada masa Hindia Belanda, Surakarta menduduki wilayah yang disebut dengan *Vorstenlanden* yang berarti tanah raja-raja atau dapat disebut dengan Daerah Kerajaan Jawa. *Vorstenlanden* merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan pemerintahannya dibagi dalam dua karesidenan. Karesidenan Surakarta dibagi dalam dua wilayah yang hampir sama besarnya, yaitu Kasunanan Surakarta milik Susuhunan Pakubuwana dan Mangkunegaran milik Pangeran Mangkunegara. Karesidenan Surakarta ini terdiri dari Kabupaten Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri.¹

Kedudukan Kasunanan yang lebih tinggi daripada Mangkunegaran berdasarkan silsilah raja-raja Mataram, dibuat lebih seimbang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, dengan memberikan konsesi-konsesi khusus kepada Mangkunegaran. Potensi kekuatan militer, wilayah, dan kekayaan, serta keyakinan bahwa kekuasaan yang didapat bukan dari pemberian, tetapi hasil perjuangan memberikan kekuatan kepada pihak Mangkunegaran secara mutlak untuk menolak setiap hubungan dengan Kasunanan bila tidak berdasarkan kesamaan status.

¹ George D. Larson. *Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 1.

Pada awal kedatangan Jepang dirasakan bahwa Jepang sangat berpengaruh, ditandai ketika Dr. Soetomo berpidato di hadapan kaum bangsawan dan mengajak mereka dalam kedudukannya sebagai ksatria, prajurit, aristokrasi Indonesia untuk berusaha menandingi samurai yang merupakan “obor” bagi bangsa Jepang.² Hal ini memunculkan kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda karena pemerintah kolonial menangkap tanda-tanda yang menarik perhatian bahwa Jepang menempatkan penguasa-penguasa tradisional Surakarta sebagai pusat perhatian.

Pada tahun 1936, pemerintah kolonial Belanda mendapat informasi bahwa orang-orang Jepang mulai melakukan kunjungan ke Kasunanan dan Mangkunegaran, memperpanjang pemberian izin tambang tembaga yang tidak menguntungkan di Wonogiri dan disusul oleh banyaknya orang Jepang yang mulai tinggal di Surakarta serta seorang pemilik toko *Fujiyoko Store* bernama Sawabe yang rajin menjalin hubungan dengan Kasunanan dan Mangkunegaran.³

Berbagai pendekatan yang dilakukan Jepang terhadap pemerintahan Surakarta merupakan sebuah strategi untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang ada di Surakarta. Pemerintahan militer berpegang pada tiga prinsip utama, yaitu mengusahakan agar mendapat dukungan rakyat untuk memenangkan perang dan mempertahankan ketertiban umum, memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang telah ada, dan meletakkan dasar agar wilayah yang

² *Ibid.*, hlm. 279.

³ *Ibid.*, hlm. 280-283.

bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri untuk menjadikannya pusat persediaan makanan.⁴

Jepang juga melakukan perubahan dalam administrasi dan pemerintahan. Dilakukan pertemuan antara militer Jepang dengan Susuhunan Pakubuwana XI dan Pangeran Mangkunegara VII untuk mengumumkan bahwa daerah Surakarta prinsipnya berstatus seperti pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Militer Jepang melaksanakan politiknya di Surakarta, diantaranya dengan membangkitkan perasaan rakyat Surakarta untuk anti Belanda, hal-hal yang berbau Belanda untuk tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti, berbicara bahasa Belanda, menyanyikan lagu kebangsaan Belanda, sampai toko-toko yang menggunakan papan nama bahasa Belanda harus diganti.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 mulai tersebar berita tentang kekalahan Jepang. Namun, para pemuda dan para pemimpin masih meragukan kebenarannya, mereka masih menunggu berita resmi dari Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus, berita proklamasi disiarkan dari Jakarta ke seluruh dunia dan disambut meriah di Indonesia termasuk Surakarta. Terjadi peralihan kekuasaan dengan dipicu semangat para pemuda dan tokoh-tokoh pergerakan. Peralihan kekuasaan di Surakarta berjalan berbeda dengan tempat-tempat lain di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan kedudukan Surakarta mempunyai sifat tersendiri.

Proklamasi kemerdekaan telah melahirkan pemerintahan yang baru menggantikan pemerintahan pada masa pendudukan Jepang, dengan lahirnya

⁴ Sutarno. *Peranan Masyarakat Desa di Jawa Tengah dalam Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945-1949 : Daerah Kendal dan Salatiga* (Jakarta: Depdikbud RI, 1997), hlm. 18.

pemerintahan baru ini menjadikan Indonesia memasuki periode revolusi. Bangsa Indonesia memulai fase revolusi sejak Soekarno-Hatta memproklamkan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta pada 17 Agustus 1945.⁵ Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan tidak hanya merupakan suatu kisah utama dalam sejarah Indonesia namun juga merupakan suatu unsur yang kuat di dalam persepsi bangsa Indonesia itu sendiri.⁶

Pembentukan pemerintahan di Surakarta setelah Proklamasi didasarkan pada proses pelembagaan negara yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Proses pelembagaan negara tersebut berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, memilih Sukarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).⁷ Terbentuknya KNIP diikuti dengan pembentukan KNI Daerah (KNID). Komite Nasional Indonesia Daerah Surakarta mengambil seluruh kekuasaan yang dibawah oleh Jepang, hal tersebut menjadikan bahwa pemerintahan di Surakarta dikendalikan oleh KNID.

Pembentukan pemerintahan daerah republik di Surakarta tidak menjadikan pengambil alihan kekuasaan menjadi selesai. Bahkan dengan dibentuknya pemerintahan republik, keadaan di Surakarta menjadi membingungkan rakyat karena terjadi pemerintahan yang “tumpang tindih”. Setelah pemerintahan sipil Jepang menyerahkan kekuasaannya, masih ada kekuasaan Jepang yang nyata

⁵ George McTurnan Kahin. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik* (Surakarta: UNS Press, 1995), hlm. 174-175.

⁶ M. C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: UGM Press, 1999), hlm. 317.

⁷ G. M. Kahin, *Op. Cit.*, hlm. 177.

memegang senjata lengkap, yaitu *Butai Masse* (pasukan yang berkuasa untuk seluruh Surakarta).⁸

Penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Republik Indonesia hanya dilakukan oleh KNID, sementara Kasunanan dan Mangkunegaran oleh sebagian orang dianggap tidak melibatkan diri dalam kejadian-kejadian penting pada awal proklamasi. Hal tersebut menumbuhkan persepsi bahwa kedua pemerintahan tradisional tersebut tidak berpihak kepada Republik Indonesia. Persepsi tersebut sangat bertentangan dengan pihak kedua pemerintahan tradisional yang diwakili oleh Pakubuwana XII dan Mangkunegara VIII yang berpendapat bahwa, mereka tidak terlibat dalam penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang karena wewenang itu milik pemerintah pusat. Perbedaan persepsi ini merupakan awal dari konflik antara KNID dan bangsawan yang berkembang ke arah perlawanan dan penolakan terhadap kekuasaan Kasunanan dan Mangkunegaran.

Adanya konflik antara kelompok yang menghendaki perubahan dasar dalam pemerintahan kerajaan dengan kelompok yang tetap mempertahankan pemerintahan tradisional memunculkan Gerakan Anti Swapraja (GAS). Swapraja sendiri berarti suatu wilayah yang mendapatkan hak memerintah sendiri dalam bentuk kerajaan, sehingga memberi kekuasaan yang luas kepada raja dan aparatnya untuk menentukan jalannya pemerintahan di daerah tersebut. Bentuk

⁸ Darmansyah. *Krisis Pemerintahan Daerah di Surakarta (1945-1950)* (Skripsi Sarjana yang tidak diterbitkan. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1995), hlm. 37 dikutip dari *Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah, Republik Indonesia Propinsi Djawa Tengah* (Semarang, 1952), hlm. 23.

Swapraja ini adalah kelanjutan dari bentuk *Vorstenlanden* yang diberikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada Surakarta. Hal ini membuat kaum revolusioner menganggap pengesahan pemerintah Swapraja sama saja dengan mempertahankan sistem kerajaan yang memberikan hak-hak khusus kepada kaum bangsawan di dalam masyarakat.⁹

Para pemuda pelajar yang mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat, aktif pada kelompok anti Swapraja, diantaranya terdapat pula pemuda-pemuda bangsawan, hal ini diakibatkan perpecahan yang timbul di kalangan para bangsawan sendiri.¹⁰ Para pemuda tersebut melepaskan gelar kebangsawanannya untuk menunjukkan sifat revolusinya dan bergabung dengan para pemuda dari rakyat biasa.

Hal yang membuat antipati para pemuda dan para pelajar revolusioner terhadap elit birokrat pamong praja adalah sikap kaum pamong praja yang cenderung berorientasi secara vertikal. Hal tersebut menjadikan kaum pamong praja dalam menghadapi perubahan-perubahan yang cepat sekali tidak dapat menyesuaikan diri. Pada saat revolusi dimana semua keputusan harus dibuat secara tegas dan cepat, tetapi kaum pamong praja ragu untuk cepat mengambil sikap, sementara kaum pemuda dan rakyat reaktif terhadap situasi baru. Oleh sebab itu, dapat dipahami apabila golongan pemuda dan rakyat pada umumnya menuduh kaum ini sebagai kelompok ragu-ragu menerima Republik. Mereka

⁹ *Ibid.*, hlm. 10-11.

¹⁰ *Ibid.*, hlm, 97 yang dikutip dari Arsip Djawatan Penerangan Karesidenan Soerakarta. *Pandangan Tentang Pergolakan Politik di Soerakarta, 1950.*

sebaliknya dituduh masih loyal terhadap pemerintah Belanda dan dianggap masih mengharapkan kedatangan Belanda lagi.

Gerakan Anti Swapraja (GAS) banyak melakukan perlawanan-perlawanan, puncaknya adalah saat Papatih Dalem Kasunanan KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh kelompok GAS. Aksi tersebut diikuti dengan pencopotan bupati-bupati yang umumnya masih kerabat raja dan digantikan oleh orang-orang yang mendukung GAS. Pada Maret 1946, Papatih Dalem yang baru juga diculik dan dibunuh. Pada April 1946, Gerakan Anti Swapraja mencari dukungan ke daerah-daerah kabupaten wilayah Surakarta. Pengaruh anti Swapraja di Sragen, mula-mula diterima oleh partai-partai politik, yang kemudian masuk ke kalangan badan-badan perjuangan.¹¹

Pengaruh anti Swapraja menyebabkan wilayah-wilayah di bawah pemerintahan Surakarta ikut bergabung karena menginginkan pembubaran pemerintahan Mangkunegaran dan Susuhunan yang sering terjadi pertentangan antara kelompok yang mengharapkan perubahan dasar dalam pemerintahan kerajaan dan kelompok yang tetap mempertahankan birokrasi tradisional. Pada akhirnya, hal tersebut membuat banyaknya daerah-daerah, salah satunya Kota Sragen, yang pada tanggal 27 April 1946 melepaskan diri dari pemerintahan Surakarta dan bergabung dengan pemerintahan pusat Republik Indonesia sebagai pernyataan rasa persatuan dan kesetiaan.

¹¹ Nurdianto. *Sejarah Revolusi di Tingkat Lokal* (Yogyakarta: BPNB, 2013), hlm. 97.

Setelah memutuskan untuk berhubungan langsung dengan pemerintah pusat Republik Indonesia, Kota Sragen menghadapi sendiri masa revolusi yang sedang terjadi di Indonesia akibat ancaman kembalinya kekuasaan kolonial. Selama masa perjuangan kemerdekaan, muncul pemimpin-pemimpin perjuangan yang mampu memobilisasi kekuatan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap musuh dan mengakibatkan lahirnya organisasi-organisasi perjuangan. Adanya tekanan emosional menjadikan rakyat ikut menggabungkan diri dengan organisasi-organisasi perjuangan tersebut.

Badan perjuangan daerah Sragen yang paling berpengaruh dalam usaha mendukung anti Swapraja adalah Angkatan Muda Sukawati (AMS). Hampir semua kelaskaran di daerah Sragen tidak ada perbedaan pendapat dalam usaha mendukung GAS. Komite Nasional Indonesia Daerah Sragen mengadakan rapat dalam keinginannya untuk lepas dari ikatan Swapraja. Rapat tersebut dihadiri oleh rakyat, badan-badan perjuangan, dan Lurah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Sragen yang dibacakan oleh Soehari selaku Ketua Dewan Pekerdja KNI Sragen.¹²

Sejak kedatangan Belanda, dominasi Barat terhadap rakyat terus berkembang, bukan hanya dalam bidang ekonomi dan politik namun juga dalam bidang-bidang lainnya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa dominasi tersebut membawa suatu perubahan yang cukup besar terhadap struktur masyarakat setempat yang pada akhirnya telah mendorong terciptanya kondisi yang meresahkan dan memunculkan gerakan sosial.

¹² Kedaolatan Rakjat. *Sekitar Daerah Istimewa Soerakarta*, 4 Mei 1946

Periode perjuangan kemerdekaan tahun 1945-1949 merupakan periode perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih cita-cita agar dapat hidup secara layak sebagai bangsa yang merdeka. Selama periode tersebut, peranan masyarakat terutama para pemuda dan kalangan elit sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peranan masyarakat selama masa revolusi dalam berbagai hal dilakukan dengan penuh pengabdian. Tekanan emosional yang dimotivasi oleh semangat mempertahankan kemerdekaan menyebabkan rakyat bersedia memberikan apa saja yang dimilikinya untuk kepentingan perjuangan.

Penyebaran proklamasi yang dilakukan oleh golongan pemuda di daerah-daerah kabupaten, termasuk Kabupaten Sragen, tidak mengalami kesulitan. Secara keseluruhan aksi-aksi revolusioner di daerah dipelopori oleh pejuang-pejuang yang terdiri dari berbagai kelompok pemuda-pemuda pergerakan (pemuda-pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan), politisi bekas partai-partai politik (partai-partai politik yang pada masa kolonial Belanda aktif berjuang), bekas pasukan pribumi yang diperbantukan dalam pasukan Jepang, serta kesatuan-kesatuan yang berasal dari Surakarta yang pulang bertugas dari luar Surakarta.

Suatu revolusi terjadi karena ledakan kekuatan-kekuatan yang menghendaki perubahan-perubahan sosial dan politik, atau ledakan aspirasi yang telah sekian lama tertekan dan tertimbun, naik dan meledak ke permukaan. Oleh karena itu, sifat revolusi biasanya disertai pula dengan tindak kekerasan, huru-hara, sampai tindak anarki. Tindak kekerasan yang sangat menonjol dalam suatu

revolusi ini adalah akibat dari tidak berfungsinya sistem sosial, karena penguasa menentang perubahan-perubahan.

Gejolak revolusi yang terjadi tidak hanya tentang perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan identitas barunya namun juga mencakup mengenai permasalahan-permasalahan sosial. Dampak sosial yang dialami masyarakat dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari akibat terjadinya revolusi yang menjadikan fokus teralihkan kepada perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Munculnya tindakan kriminalitas sampai masalah pendidikan merupakan bukti dari permasalahan sosial yang dialami masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, akhirnya penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai **Sragen di Masa Revolusi : Dampak Sosial dan Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta, 1944-1949**. Penulis memilih permasalahan pada konteks topik penelitian tersebut dengan beberapa alasan. Pertama, penulis merasa penelitian tentang Kota Sragen masih sedikit, terutama mengenai kejadian-kejadian pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dimana situasi sosial, ekonomi, dan politik mengambil andil untuk kemunculan revolusi di wilayah-wilayah Indonesia termasuk Jawa Tengah khususnya Kota Sragen.

Kedua, pembahasan mengenai Kota Sragen yang tersedia hanya membicarakan pembentukan-pembentukan laskar ketika terjadinya revolusi itu sendiri, tetapi tidak menguraikan apa yang terjadi secara aksi dan reaksi terhadap proses kemerdekaan Indonesia. Kajian ini disampaikan dalam buku berjudul *Sejarah Revolusi di Tingkat Lokal* karya Nurdiyanto. Alasan terakhir karena

penulis memiliki kedekatan emosional sebagai orang yang dibesarkan di Kota Sragen, sehingga penulis menganggap perlu untuk melakukan semacam kajian khusus mengenai Sragen serta mengejar sumber-sumber lisan yang masih menyimpan ingatan-ingatan mengenai masa silam terutama mengenai periode revolusi.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup pembatasan spasial (ruang) dan temporal (waktu). Batas spasial yang ditetapkan oleh penulis adalah wilayah Sragen yang merupakan sebuah kota satelit yang memiliki kota induk yaitu, Surakarta. Bagaimanapun, Sragen merupakan kota yang terkena dampak dari perubahan sosial dan politik yang terjadi di Surakarta dikarenakan sejarah Sragen yang pernah berada di bawah ikatan Swapraja Surakarta.

Sedangkan batas temporal yang ditetapkan oleh penulis adalah sekitaran tahun 1944 sampai 1949. Batas awalnya adalah tahun 1944 karena pembahasan diawali saat Jepang masih menduduki Indonesia dan berlanjut dengan munculnya revolusi. Masa revolusi ini para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan mengusir kedatangan kembali kolonial. Kemudian batas akhir dari penelitian ini adalah tahun 1949 karena kondisi Indonesia yang berangsur-angsur membaik.

Pokok permasalahan tersebut memunculkan berbagai macam permasalahan dan pertanyaan yang penulis rumuskan dan fokuskan pada pertanyaan-pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Mengapa Sragen memilih keluar dari ikatan Swapraja Surakarta?
2. Bagaimana kondisi sosial dan proses jalannya revolusi di Sragen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sejarah Kota Sragen pada masa revolusi yang difokuskan kepada dampak sosial dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dari segi teoritis, untuk menambah wawasan pengetahuan dan pelengkap kajian Sejarah Indonesia, khususnya Sejarah Lokal dan Sejarah Revolusi di Indonesia dan dari segi praktis, untuk Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta sebagai bahan studi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan untuk Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta sebagai bahan masukkan mata kuliah Sejarah Lokal Indonesia.

D. Metode dan Sumber Penelitian

1. Metode

Penelitian ini membahas tentang sejarah Kota Sragen pada masa revolusi yang difokuskan kepada dampak sosial dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Penelitian Sejarah Indonesia masa revolusi merupakan rangkaian proses dari terbentuknya Republik Indonesia seperti sekarang. Sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah mempunyai lima tahapan yaitu, pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi: analisis dan sintesis, dan penulisan.¹³

Tahap awal penelitian skripsi ini setelah pemilihan topik untuk diteliti adalah pengumpulan sumber primer dan sekunder sebagai sumber penulisan. Sumber-sumber primer seperti arsip, surat kabar, dan dokumen pemerintahan yang terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) di Salemba. Sedangkan sumber-sumber sekunder seperti buku ataupun jurnal yang terdapat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) di Medan Merdeka, Arsip dan Perpustakaan Daerah Surakarta, Perpustakaan Daerah Sragen, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ruang Baca Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNJ, Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), Perpustakaan Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Perpustakaan Museum Satria Mandala untuk memperdalam kajian pustaka.

¹³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

Tahap kedua yang dilakukan adalah verifikasi data. Bahan-bahan penulisan yang sudah didapatkan dari berbagai sumber akan dikaji dan dikritik baik secara intern maupun ekstern dalam rangka untuk memastikan keaslian serta keakuratan data-data yang terdapat dalam bahan-bahan penelitian skripsi ini, sehingga didapatkan fakta-fakta yang mendukung penelitian. Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Dalam proses interpretasi, fakta-fakta yang sudah diperoleh penulis disusun sesuai dengan urutan kejadian dan kemudian dianalisis hubungan dari fakta satu dengan fakta yang lainnya, sehingga menjadi suatu rangkaian deskripsi tulisan sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat. Pada tahap akhir yaitu, penulisan atau historiografi, penulis merangkai fakta yang telah diinterpretasikan menjadi sebuah deskripsi tulisan yang ditulis secara ilmiah dan tersusun secara kronologis sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan diuji.

2. Sumber Penelitian

Sumber data yang menunjang penulisan proposal skripsi ini didapat dari buku-buku, dokumen dan artikel yang berhubungan dengan penulisan sejarah Kota Sragen pada masa revolusi. Buku yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang relevan membahas tentang Kota Sragen dan Surakarta di masa revolusi seperti, *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946* karya Ben Anderson, *Sejarah Revolusi di Tingkat Lokal* karya Nurdiyanto, dan *Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942* karya George D. Larson. Selain dari buku, penelitian ini juga menggunakan sumber primer dari arsip seperti, *ANRI Kepolisian Negara No.*

977, *ANRI Sekretariat Negara RI 1945-1949 No. 539*. Sumber primer lainnya adalah surat kabar seperti, *Asia Raja 1945, Merdeka 1946, Kedaoelatan Rakjat 1946*, dan *Antara 1947*.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penelitian ini ke dalam empat bab untuk lebih memudahkan penulis menjelaskan penelitian yang dilakukan, diantaranya bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mencakup dasar pemikiran, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan bahan sumber, serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi pembahasan mengenai kondisi Kota Sragen pada masa di bawah ikatan Swapraja Surakarta serta adanya krisis di dalam pemerintahan Surakarta yang diakibatkan adanya pendudukan Jepang yang pada akhirnya membuat Kota Sragen memilih melepaskan diri dari ikatan Swapraja Kasunanan Surakarta dan berhubungan langsung dengan pemerintah pusat Republik Indonesia.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai Kota Sragen setelah keluar dari ikatan Swapraja Surakarta dan ikut mendukung revolusi kemerdekaan salah satunya dengan dibentuknya badan-badan perjuangan seperti laskar-laskar rakyat. Bab ini juga membahas kondisi sosial dan ekonomi yang dialami Kota Sragen pada masa revolusi. Bab keempat yang merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dibagi kedalam beberapa bab sebelumnya.